

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 2  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:

1. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
2. Direktur Utama Perum BULOG;
3. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
4. PT Sang Hyang Seri (Persero);
5. PT Pertani (Persero);
6. PT Berdikari (Persero);
7. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
8. PT Garam (Persero);
9. Perum Perikanan Indonesia; dan
10. PT Perikanan Nusantara (Persero).

Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 15 Maret 2021  
Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI  
Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lt. 1, Senayan,  
Jakarta.

Acara : Membahas:

1. Ketersediaan Pangan Nasional; dan
2. Isu lainnya.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F.PG), Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem), dan G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 44 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir:

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);
5. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
6. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
7. Budi Waseso (Direktur Utama Perum BULOG);
8. Arief Prasetyo Adi Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
9. Karyawan Gunarso Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
10. Maryono Direktur Utama PT Pertani (Persero);
11. Harry Warganegara Direktur Utama PT Berdikari (Persero);
12. Fatah Setiawan Topobroto (Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia);
13. Farida Mokodompit Direktur Utama PT Perikanan Nusantara (Persero);
14. Arif Haendra Kuasa Direktur Utama PT Garam (Persero); dan
15. Fasika Khaerul Zaman Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

## I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur Jenderal Hortikultura, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Direktur Utama Perum BULOG, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Garam (Persero), Perum Perikanan Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara (Persero), membahas Ketersediaan Pangan dan Isu Lainnya dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam tata kelola komoditas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menolak keputusan rencana importasi 1 juta ton beras oleh Perum BULOG.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian maupun kelautan dan perikanan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta BUMN Pangan dalam mendukung ketahanan pangan agar memiliki rencana bisnis yang konkret sehingga tidak hanya mengandalkan penugasan impor saja akan tetapi menjadi unit penghasil pangan di dalam negeri.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang seimbang (antara menyerap gabah petani dan penugasan penyaluran) kepada Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan pengadaan dan penyaluran komoditas pangan strategis nasional. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI merekomendasikan untuk melanjutkan penugasan kepada Perum BULOG mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan mengutamakan penyerapan gabah beras produsen dan penugasan untuk penyaluran kepada masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka ketahanan pangan nasional, dengan demikian terjadi perputaran stok beras di Gudang BULOG.
4. Komisi IV DPR RI meminta BUMN Klaster Pangan di sektor kelautan perikanan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi, pengendalian dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap adanya impor garam untuk industri aneka pangan yang diduga masih terjadi kebocoran di pasar tradisional, serta menyerap garam rakyat dan perbaikan kualitas NACL sehingga kehadiran negara dapat mensejahterakan petambak garam.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk melakukan penguatan dan meningkatkan peranan BUMN bidang Pertanian sesuai dengan kompetensi intinya dalam menunjang pembangunan pertanian yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi petani, terutama dalam penyediaan sarana prasarana pertanian, seperti dalam penyediaan benih atau bibit unggul yang dibutuhkan petani.
6. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan pemetaan secara komprehensif kondisi pangan nasional terutama peta terkait dengan ketersediaan dan cadangan pangan, hingga Peta daerah Produksi dan daerah yang sering mengalami kelangkaan pangan pokok saat menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.
7. Komisi IV DPR RI meminta BUMN bidang Pertanian dan Kelautan Perikanan untuk menjalin kerjasama dengan BUMDes, Koperasi, Lembaga Permodalan, serta Kelompok Usaha Pengolahan dan Pemasaran yang menjadi binaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) sehingga dapat membantu memulihkan perekonomian petani dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terkena dampak Pandemi Covid-19.

8. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan perbaikan data, agar lebih komprehensif dan valid dalam menyajikan data produksi dan data impor komoditas pertanian, untuk melindungi kepentingan produsen pangan dan konsumen pangan dalam negeri.
9. Komisi IV DPR RI meminta Perum BULOG untuk berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Sosial agar penyaluran beras kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dilakukan oleh Perum BULOG.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis dan mengubah kewajiban Wajib Tanam Komoditas Bawang Putih yang dilakukan oleh Importir dilakukan sebelum diterbitkan RIPH.
11. Komisi IV DPR RI bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) mengenai Pangan.
12. Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk membentuk Badan Pangan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.32 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian,

Ttd.

**Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.**

Direktur Utama  
Perum BULOG,

Ttd.

**Budi Waseso**

Direktur Utama  
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero),

Ttd.

**Arief Prasetyo Adi**